

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia dihadapkan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu aspek dari ASEAN yang telah disepakati oleh negara-negara anggota. Sejak pembentukan ASEAN pada tahun 1967 sebagai organisasi regional, para anggotanya memprioritaskan kerja sama ekonomi sebagai salah satu tujuan utama organisasi tersebut (About ASEAN "Establishment", 2022). Para pemimpin ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai zona stabilitas dan independensi dari pengaruh kekuatan ekstra-regional (Inayati, 2007). Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan sosial di kawasan Asia-Pasifik dapat dikurangi dengan bantuan pertumbuhan ekonomi yang terkoordinasi. Association of South East Asian Nation (ASEAN) tidak muncul begitu saja; melainkan mengikuti serangkaian organisasi regional dengan fokus yang lebih sempit (Cipto, 2007).

Pada tahun 2015, visi terwujudnya MEA adalah memiliki pasar tunggal. Dengan demikian, akan ada liberalisasi berupa aliran bebas barang dan jasa bagi negara-negara ASEAN, seperti arus bebas barang dan jasa (Rifka, 2021), arus tenaga kerja terampil (BBC NEWS INDONESIA, 2014), dan arus bebas modal (Djauhari, 2007). Konsekuensi tersebut adalah hasil kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Indonesia harus memperkuat kapasitasnya agar mampu bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya sehingga tidak ada kekhawatiran kehilangan daya saing di negaranya sendiri akibat implementasinya MEA 2015 dibatalkan. Untuk itu, pemerintah Indonesia juga sedang mempersiapkan diri agar negara dapat memanfaatkan momentum MEA saat ini terutama Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, jelas bahwa agar Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi dari MEA, diperlukan tingkat keterlibatan pemegang saham yang lebih tinggi (Warsono, 2017). Juga ditemukan ditentukan bahwa kuantitas keuntungan ekonomi berbeda-beda di antara negara-negara anggota ASEAN yang tergabung dalam MEA. Namun daya saing Indonesia sekali lagi menjadi kendala utama bagi keberhasilan negara tersebut dalam

menghadapi MEA (ASEAN Economic Corporation: Trade Liberalization Impacts on The National Economy, 2012).

### **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah, yaitu “**Bagaimana Upaya Indonesia Dalam Mengurangi Hambatan Perdagangan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Era Pemerintahan Joko Widodo**”.

### **C. Tujuan Penulisan**

Diharapkan tulisan ini dapat menjelaskan/mendeskripsikan Pemerintahan Joko Widodo terhadap proses implementasi upaya Indonesia dalam mengurangi hambatan perdagangan dalam menghadapi MEA.

### **D. Kerangka Berpikir**

Penulis menggunakan Teori Liberalisme Ekonomi yang bisa membantu menjelaskan upaya pemerintah Indonesia di era Joko Widodo dalam mengurangi hambatan perdagangan dan investasi menghadapi MEA. Teori Liberalisme Ekonomi ini berfokus pada kebebasan pasar dan perdagangan bebas antara negara-negara yang terlibat, dan mendorong liberalisasi ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks MEA, Teori Liberalisme Ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, serta memperkuat ikatan ekonomi antara negara-negara tersebut. Pemerintah Indonesia dalam Era Joko Widodo telah melakukan berbagai reformasi ekonomi, termasuk mengubah peraturan dan regulasi yang memudahkan perdagangan bebas, dan peningkatan investasi asing.

Selain itu, Teori Liberalisme Ekonomi juga menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia, yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar ASEAN. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta mengembangkan tenaga kerja yang lebih terampil dan terlatih. Namun demikian, ada juga kritik terhadap Teori Liberalisme Ekonom, terutama berkaitan dengan risiko kehilangan kedaulatan ekonomi dan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menjaga keseimbangan antara liberalisasi ekonomi dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. (Nugraha, 2010).

Untuk memudahkan dalam menindaklanjuti pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN/*ASEAN Economic Community*, dan mengapa para

negara-negara anggota perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA tersebut. Hal ini dapat dipahami dari pengertian yang lebih awal dan umum, yakni pengertian atau definisi dari komunitas ekonomi (Economic Community). Pengertian komunitas ekonomi dalam hal ini dapat diartikan sebagai kelompok yang dalam hal ini berupa negara-negara yang saling berinteraksi didalam daerah atau kawasan tertentu yang menyangkut tentang masalah-masalah ekonomi yang biasanya berupa arus barang, jasa modal dan sebagainya yang masih berkaitan dengan ekonomi. Pengertian yang secara konseptual mengenai komunitas ekonomi ini memang tidak ditemukan, namun dalam hal ini dapat dilihat bagaimana aktualisasi dari komunitas ekonomi tersebut yang bisa terlacak atau temukan pada organisasi kawasan seperti Uni Eropa. Komunitas ekonomi yang ada di Uni Eropa terkait dengan masalah arus barang, arus modal dan investasi, dan sebagainya. Begitu juga dalam ASEAN Economic Community, yang didalamnya terkait dengan satu komunitas yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN yang saling berinteraksi dalam hal arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas modal dan arus bebas tenaga kerja terampil.

Dari sinilah kemudian dapat dimengerti bahwa komunitas ekonomi itu adalah interaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada wilayah tertentu atau kawasan tertentu yang di dalamnya menyangkut permasalahan-permasalahan ekonomi seperti yang telah dibahas. ASEAN Economic Community adalah salah satu bentuk dari liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yang mengacu pada pilar-pilar AEC. AEC adalah langkah maju ASEAN dalam menciptakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang dapat menguntungkan negara-negara anggota dengan melakukan langkah-langkah penghapusan biaya tarif dan kuota pada barang, penghapusan hambatan di bidang jasa yang berupa pembatasan jumlah penyedia jasa, dan jumlah tenaga kerja serta penghapusan bentuk diskriminatif yang ada di dalam negeri. Liberalisasi ekonomi dan perdagangan dalam AEC juga meliputi aliran bebas investasi, dan aliran bebas tenaga kerja terampil. Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesiapan infrastruktur dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tampaknya menjadi faktor penting bagi suatu negara dalam menghadapi MEA tersebut.

#### **E. Hipotesis**

Dari rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah saya jabarkan, saya akan menjawab hipotesis penulisan ini dengan menggunakan Teori Liberalisme Ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Joko Widodo dalam mengurangi hambatan perdagangan dan investasi daya saing untuk menghadapi liberalisasi perdagangan Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) adalah Reformasi Regulasi untuk memudahkan perdagangan bebas, Pengembangan Infrastruktur, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

#### **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menulis karya ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu metode yang menggambarkan penggunaan fakta dengan menggunakan informasi sekunder yang diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, situs web dan tulisan tentang topik yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan informasi atau bahan kepustakaan dari buku, jurnal, dan bahan lain yang sesuai dengan subjek yang diteliti dan dapat diverifikasi untuk mendukung penelitian. Dalam penulisan karya ini, penulis menawarkan laporan penelitian untuk diteliti, sehingga rumusan masalah yang disajikan dapat lebih mudah dianalisis. Batas waktu yang terkait dengan judul Upaya Indonesia Dalam Mengurangi Hambatan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Era Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2016.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan karya ini, karya ini dibagi menjadi beberapa bagian bab yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga menjadi karya tulis ilmiah yang utuh. Penulis menyusun penciptaan karya ini sebagai berikut, yaitu. pada bab 1 penulis memaparkan latar belakang sumber masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. Pada Bab 2, penulis menjelaskan awal mula kebebasan perdagangan di wilayah Asia Tenggara hingga berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada Bab 3, menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi Presiden Joko Widodo dalam menghadapi MEA. Pada Bab 4, menjelaskan mengenai upaya pemerintahan Joko Widodo dalam mengurangi hambatan dalam menghadapi MEA. Bab 5, penulis menyimpulkan pekerjaan dengan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya yang diperoleh dari hasil penelitian.